



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 10 Februari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
UNIT KERJA : SEKRETARIAT KEMENTERIAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **SUSIWIJONO MOEGIARSO**
2. Jabatan : **SEKRETARIS KEMENTERIAN/KUASA PENGGUNA ANGGARAN**
3. NHK : **89162**

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** **Rp. 4.872.766.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 234 m²/90 m² di KAB / KOTA SIDOARJO, HASIL SENDIRI Rp. 341.611.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 211 m²/120 m² di KAB / KOTA KOTA JAKARTA TIMUR , HASIL SENDIRI Rp. 1.295.005.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 210 m²/200 m² di KAB / KOTA KOTA JAKARTA TIMUR , HASIL SENDIRI Rp. 1.436.550.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 200 m²/125 m² di KAB / KOTA KOTA JAKARTA TIMUR , HASIL SENDIRI Rp. 1.799.600.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 1.505.000.000**

1. MOBIL, HONDA ODDISEY Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000
2. MOBIL, HONDA CIVIC Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
3. MOTOR, YAMAHA MIO Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000
4. MOBIL, MERCEDES BENZ GLC200 AMG LINE Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 525.000.000
5. MOBIL, HONDA HRV 1.5 T RS CVT Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 475.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp. 135.275.160****D. SURAT BERHARGA** **Rp. ---****E. KAS DAN SETARA KAS** **Rp. 15.193.160.366**



F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	21.706.201.526
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	21.706.201.526

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.